



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, DAN BPLS)**

Tahun Sidang : 2010 – 2011
Masa Sidang : I
Rapat : Ke – 7 (tujuh)
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal : Kamis, 2 September 2010
Sifat : Terbuka
Pukul : 13.30 wib s.d 17.00 wib
Tempat : Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V)
Acara : Pembahasan RKA K/L Tahun Anggaran 2011
Ketua Rapat : Drs. Yoseph Umarhadi, M.Si. MA.
Sekretaris : Dra. Hani Yuliasih
Hadir Anggota : 40 dari 53 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra : Kepala Badan SAR Nasional dan Kepala Badan Pelaksana BPLS beserta jajaran terkait.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pukul 13.30 wib setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua menyampaikan agenda Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan SAR Nasional dan Kepala Badan Pelaksana BPLS untuk membahas RKA K/L Tahun Anggaran 2011.
3. Ketua mempersilakan kepada Kepala Badan SAR Nasional dan Kepala Badan Pelaksana BPLS untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua mempersilakan kepada anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan tanggapan dan pertanyaan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

1. Komisi V DPR RI memahami program kegiatan yang disampaikan oleh Badan SAR Nasional sesuai dengan Nota Keuangan RUU APBN 2011 sebesar Rp 1,163 Triliun yang terbagi dalam berbagai program sebagai berikut:

(Milyar Rupiah)

No	Program	Usulan Awal	Pagu Sementara
1	Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan dan Penyelamatan	1.228,31	839,40
2	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	220,35	215,60
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Badan SAR Nasional	120,80	108,80
	Jumlah	1.569,46	1.163,80

Selanjutnya Komisi V DPR RI akan memperjuangkan kenaikan pagu sementara sesuai kebutuhan dalam rapat pembahasan di Badan Anggaran DPR RI dan pembahasan program/kegiatan diputuskan dalam rapat Komisi V DPR RI dengan Badan SAR Nasional.

2. Komisi V DPR RI memahami program kegiatan yang disampaikan oleh Badan Pelaksana (Bapel) Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) sesuai dengan Nota Keuangan RUU APBN 2011 sebesar Rp 1.286,04 Milyar yang seluruhnya bersumber dari Rupiah Murni yang terbagi dalam berbagai program sebagai berikut:

(Milyar Rupiah)

BA	No	Program	Pagu Sementara
105	01	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	22,75
105	06	Program Penanggulangan Bencana Lumpur Sidoarjo	1.263,29
		Jumlah	1.286,04

3. Mengingat penyelenggaraan operasi SAR terkait langsung dengan keselamatan jiwa dan harta benda, Komisi V DPR RI mendukung sepenuhnya pengembangan dan pemenuhan sarana dan prasarana SAR yang dapat meminimalkan waktu tanggap (*response time*) serta peningkatan profesionalisme SDM yang dimiliki. Selanjutnya Komisi V DPR RI juga meminta Badan SAR Nasional untuk meningkatkan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait.
4. Komisi V DPR RI meminta Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Bapel-BPLS) untuk melakukan langkah-langkah kepada PT.Lapindo Brantas agar melakukan percepatan jual beli tanah dan bangunan terhadap warga yang terkena dampak lumpur Sidoarjo di wilayah yang menjadi tanggungjawabnya.
5. Komisi V DPR RI meminta Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Bapel-BPLS) untuk melakukan kajian-kajian dan analisa yang komprehensif guna membuat rencana penanggulangan dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
6. Komisi V DPR RI akan melakukan pembahasan lebih mendalam pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan diagendakan kemudian dengan Badan SAR Nasional dan Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Bapel-BPLS) untuk membahas Pagu Sementara RKA-K/L 2011.

7. Untuk mengoptimalkan tugas-tugas Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Bapel-BPLS), Komisi V DPR RI berpendapat perlunya melakukan revisi terhadap Perpres No.48 Tahun 2008 dan Perpres No.40 Tahun 2009 terutama terkait percepatan jual beli tanah dan bangunan, masalah sosial kemasyarakatan, dan pembagian tugas penanganan relokasi infrastruktur oleh Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Bapel-BPLS) dan Kementerian Pekerjaan Umum.
8. Komisi V DPR RI akan mengagendakan pertemuan dengan Dewan Pengarah BPLS guna mempercepat penyelesaian penanganan permasalahan lumpur Sidoarjo utamanya permasalahan jual beli tanah dan bangunan yang hingga saat ini masih belum terselesaikan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.00 wib.

Jakarta, 2 September 2010

KETUA RAPAT,

ttd

DRS. YOSEPH UMARHADI, MSi, MA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

ttd

MARSDYA. WARDJOKO

**KEPALA BADAN PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN
LUMPUR SIDOARJO,**

ttd

SUNARSO